



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**TAHUN
2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MAKASSAR, 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja ini disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulsel Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke V (ke-lima) atau tahun akhir pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sehingga dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

Dokumen Renja ini menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, serta memuat Hasil Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai langkah awal dalam menentukan arah dan kebijakan kita agar tahapan perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya, Terima kasih,-

Makassar, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Prov. Sulsel



Dr. M. Iqbal S. Suhaeb. SE, MT

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah	8
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB.II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023	11
2.1.1 Pendapatan Daerah	11
2.1.2 Belanja Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	60
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	65
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	67
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	84
BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	104
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	104
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel.....	107
3.2.1 Tujuan.....	107
3.2.2 Sasaran.....	108
3.3 Program dan Kegiatan	108
3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan	108

3.3.2	Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	110
BAB.IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	127
BAB.V	PENUTUP	139
5.1	Kaidah Pelaksanaan	139
5.2	Kesimpulan	141

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
Gambar I.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	4
Gambar II.1 Alur Perubahan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	12
Gambar II.2 Tampilan E-RUBIK.....	48

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1 Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2021	26
Grafik II.2 Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov Sulsel Tahun 2021	11
Tabel II.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Keuangan dan Fisik	13
Tabel II.3 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang Layak Huni Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	18
Tabel II.4 Data Jumlah Kerusakan Akibat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang Kab. Luwu Utara Tahun 202	19
Tabel II.5 Pembangunan PSU dan Jaringan Air Bersih.....	20
Tabel II.6 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	21
Tabel II.7 Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	22
Tabel II.8 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	23
Tabel II.9 Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	23
Tabel II.10 Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum Layak/ Arsinum Di Kawasan Pesisir dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	28
Tabel II.11 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	29
Tabel II.12 Pembangunan Drainase Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021	30
Tabel II.13 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	31
Tabel II.14 Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021	32
Tabel II.15 Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun di Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	32
Tabel II.16 Persentase Pengembang Perumahan dengan Tingkat Kualifikasi Menengah yang Tersertifikasi dan Teregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ...	34
Tabel II.17 Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan yang Selesai Tepat	

	Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	35
Tabel II.18	Persentase Sengketa Tanah Negara Kewenangan Provinsi yang Difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	36
Tabel II.19	Persentase Penatagunaan Tanah Sesuai Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah di 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021....	36
Tabel II.20	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.29)	37
Tabel II.21	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel (Tc.30).....	63
Tabel II.22	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.31)	68
Tabel II.23	Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Prov. Sulsel (Tc.32).....	85
Tabel II.24	Usulan Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Prov. Sulsel (Tc.32	99
Tabel III.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kemeterian PUPR 2020-2024 Per Program.....	107
Tabel III.2	Rumusan Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	111
Tabel IV.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

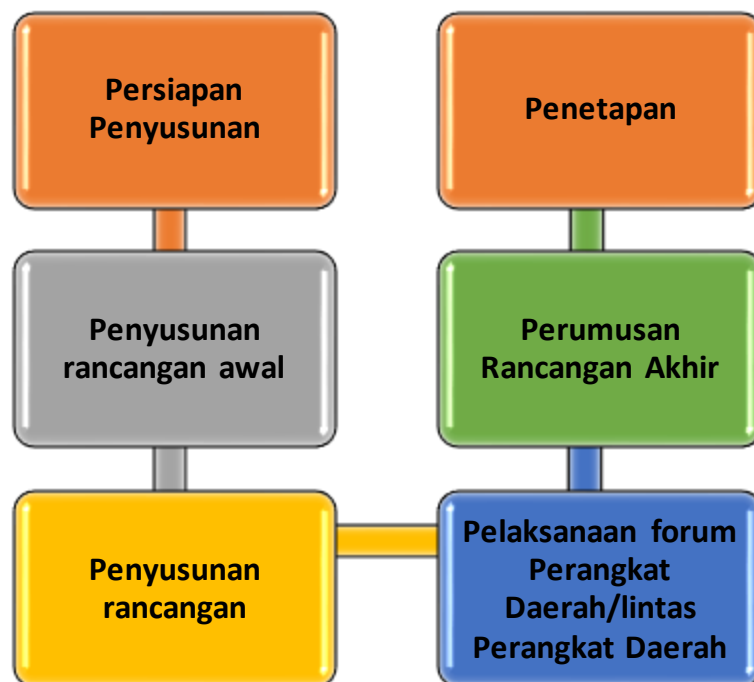
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan meliputi Pengolahan data dan informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Menganalisis gambaran pelayanan OPD, Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
3. Penyusunan Rancangan Renja, Mengidentifikasi isu-isu penting

- penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
 6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar I.1
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241); yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke V (ke-lima) atau tahun akhir pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur tentang RENSTRA Perangkat Daerah dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sehingga dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

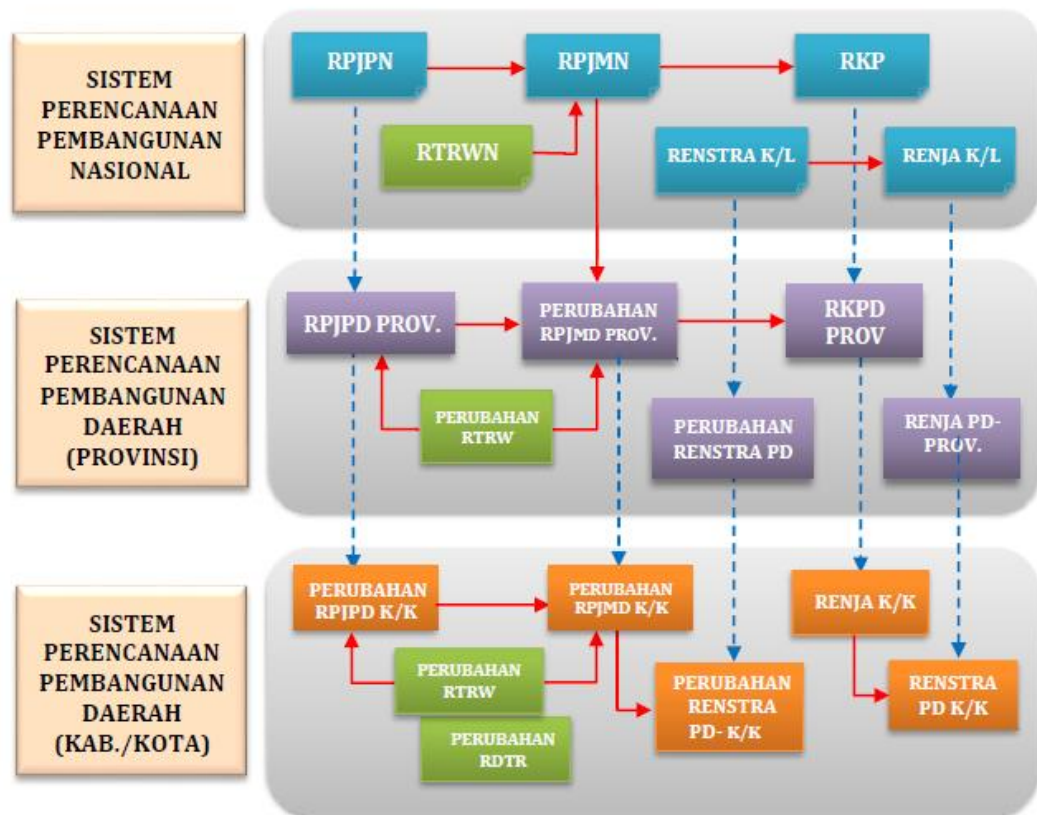
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Perkimtan Provinsi Sulsel Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan misi jangka menengah Dinas Perkimtan Prov. Sulsel yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023. Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2023 juga merupakan acuan dalam penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2023, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan RKP Tahun 2023, Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-

2023, Perubahan Renstra Provinsi Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2023 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan, seperti dapat dilihat skema berikut :

Gambar I.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3 TLD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023;
32. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023;
- b. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah;

- c. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka 1 tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian Dokumen Renja dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, pada bab I ini terdiri atas latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; Maksud dan Tujuan yang Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah; Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, yang menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Renja tahun berjalan dan realisasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN;

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan Program kegiatan dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023.

BAB V PENUTUP;

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

2.1.1. Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target pendapatan sebesar **Rp. 446.192.000,-** yang bersumber dari Sewa Ruangan ATM, Sewa Kantin Umum, Retribusi Pelataran Taman Pakui Sayang dan Retribusi Rusunawa 1 dan 2 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 diperoleh sebesar **Rp.294.788.500,-** atau **66,07%**.

Target yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi dan hanya tercapai sebesar 66,07% atau sebesar Rp.294.788.500, hal tersebut disebabkan kurangnya capaian pendapatan dari Retribusi **Taman Pakui Sayang** sebagai akibat dari Pandemi *Covid-19* yang masih melanda hampir semua wilayah Indonesia khususnya Kota Makassar, selain itu juga di sebabkan kurangnya capaian Retribusi dari **Rusunawa I dan II**, hal ini karena banyaknya fasilitas pada Rusunawa yang sudah rusak sehingga tidak layak untuk disewakan sementara anggaran untuk pemeliharaan tidak memadai.

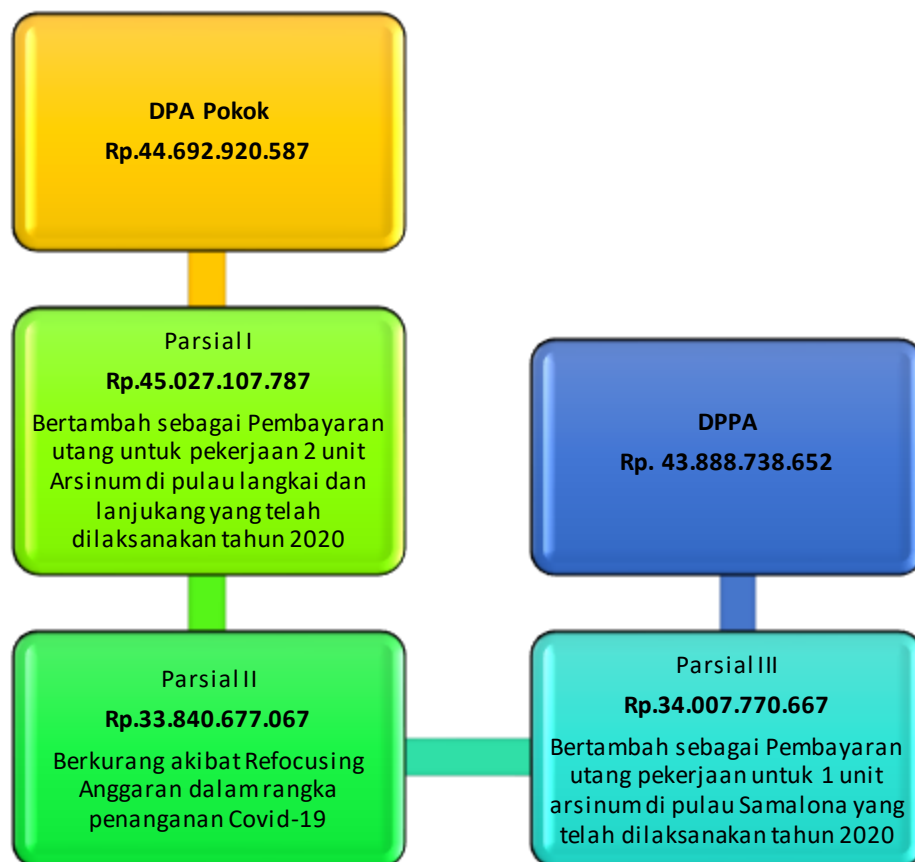
Tabel II.1: Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2021 (Rp)	REALISASI 2021		KET
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	a. Sewa Ruangan ATM				
	- ATM Bank BPD Sulselbar	14.400.000	14.400.000	100,00	Tercapai
	- ATM Bank BNI	18.000.000	18.000.000	100,00	Tercapai
	b. Sewa Kantin Umum	21.792.000	38.710.000	177,63	Melebihi
2	Retribusi Pelataran Taman Pakui Sayang	52.000.000	7.293.000	14,03	Tidak tercapai
	- Retribusi pelataran Taman Pakui Sayang		2.950.000		
	- Retribusi Parkir Taman Pakui Sayang		4.343.000		
3	Retribusi Rusunawa I dan II	340.000.000	216.385.500	63,64	Tidak tercapai
	Jumlah	446.192.000	294.788.500	66,07	Tidak tercapai

2.1.2. Belanja Daerah

Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengalami perubahan Pagu Anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan alokasi anggaran terakhir pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp.43.888.738.652,-** (Empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang dilaksanakan melalui 8 Program 17 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 40.787.353.002,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.708.535.115,- untuk membiayai gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebanyak 106 orang. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 28.078.817.887,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.101.385.650,-

Gambar II.1: Alur Perubahan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021



Realisasi Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.950.882.070,03,- (91,03%) dari total anggaran belanja. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.38.070.080.270,03,- (93,34%) dan Realisasi Belanja Modal

sebesar Rp.1.880.801.800,- (60,64%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Keuangan dan Fisik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	FISIK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.556.044.999	16.980.415.451	86,83%	99,21%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.433.782.200	1.157.599.395	80,74%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	991.332.000	745.140.073	75,17%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.147.500	47.264.100	88,93%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.346.500	13.669.335	51,88%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.743.000	11.481.500	77,88%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.122.500	12.999.540	92,05%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.016.700	97.248.630	96,27%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.074.000	229.796.217	98,59%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.029.272.365	12.780.953.706	98,09%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.708.535.115	12.512.127.326	98,45%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.452.500	4.171.500	93,69%	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.560.000	73.858.000	97,75%	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.340.000	6.044.000	95,33%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.847.750	5.390.000	20,85%	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	149.810.000	124.321.880	82,99%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	7.472.000	4.065.000	54,40%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	51.255.000	50.976.000	99,46%	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.381.000	96.067.700	73,12%	100%

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	60.272.000	28.196.500	46,78%	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.764.000	12.193.000	82,59%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.345.000	55.678.200	98,82%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	457.493.500	279.805.000	61,16 %	66,29 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	154.220.000	0,00	0,00%	0,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	119.573.500	99.321.500	83,06%	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	118.815.000	116.593.500	98,13%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.885.000	63.890.000	98,47%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.000.000	69.870.000	99,81 %	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.903.750	8.687.600	97,57 %	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.175.452.850	410.898.000	34,96%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255.475.500	250.139.000	97,91%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.020.000	93.592.000	89,12%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.799.834	261.486.374	63,34 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.799.834	261.486.374	63,34 %	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.546.464.000	1.641.186.676	64,45 %	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.320.000	124.775.176	59,33%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.460.000	124.281.500	43,23 %	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.048.684.000	1.392.130.000	67,95%	100%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.669.425.300	6.205.748.414	93,05%	100%
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.806.630.900	1.745.842.011	96,64%	100%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1.155.659.000	1.128.602.802	97,66%	100%

	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	80.371.500	75.872.478	94,40%	100%
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	88.400.000	86.698.962	98,08%	100%
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	76.810.000	67.227.657	87,52%	100%
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	405.390.400	387.440.112	95,57%	100%
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.130.290.400	806.698.560	71,37%	100%
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	242.898.000	221.864.789	91,34%	100%
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	242.898.000	213.646.389	87,96%	100%
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	629.170.000	364.276.361	50%	100%
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	4.754.400	3.223.419	67,80%	100%
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	3.810.000	1.079.201	28,33%	100%
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	6.760.000	2.608.401	38,59%	100%
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3.732.504.000	3.653.207.843	97,88%	100%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.730.678.000	3.653.077.843	97,92%	100%
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.826.000	130.000	7,12%	100%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas)	7.317.939.150	6.722.951.185	91,87%	100%
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	346.000.750	229.862.955	66,43%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	179.747.750	114.470.043	63,68%	100%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	166.253.000	115.392.912	69,41%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6.971.938.400	6.493.088.230	93,13%	100%
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.044.840.000	2.979.117.295	97,84%	100%
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.927.098.400	3.513.970.935	89,48%	100%
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (Prioritas)	8.306.701.500	8.132.490.608	97,90%	100%
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	8.306.701.500	8.132.490.608	97,90%	100%
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1.243.518.000	1.202.807.056	96,73%	100%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6.928.476.000	6.811.243.752	98,31%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	85.823.500	72.555.800	84,54%	100%
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	48.884.000	45.884.000	93,86%	100%
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	439.445.703	409.216.016	93,12%	100%
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	439.445.703	409.216.016	93,12%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi	439.445.703	409.216.016	93,12%	100%

	Menengah				
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	135.380.000	126.200.729	93,22%	100%
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	135.380.000	126.200.729	93,22%	100%
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	135.380.000	126.200.729	93,22%	100%
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	209.504.000	163.205.499	77,90%	100%
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	209.504.000	163.205.499	77,90%	100%
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	105.072.000	79.254.929	75,43%	100%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.432.000	83.950.570	80,39%	100%
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.254.298.000	1.210.654.168	96,52%	100%
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.254.298.000	1.210.654.168	96,52%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	289.663.000	275.905.868	95,25%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	964.635.000	934.748.300	96,90%	100%

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, mempunyai tugas menyelenggarakan 2 Bidang Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

A. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi

Pencapaian persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi pada tahun 2017-2018 berupa

penyusunan DED penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang berlokasi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota Pare-Pare. Tahun 2019-2021 tidak ada warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi yang difasilitasi untuk peyediaan rumah layak huni. Pencapaian terhadap indikator Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) belum optimal karena mayoritas masyarakat yang terkena relokasi tidak menginginkan relokasi melainkan ganti untung. Selain itu pada tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi tentang mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan yang melibatkan stakeholder dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini dimaksudkan meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan, dan bertujuan untuk terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan.

Tabel II.3
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi

Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk SPM Perumahan berupa penyusunan dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman, serta 2 unit *prototype* rumah contoh korban bencana dalam bentuk rumah instan sederhana sehat (RISHA). Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bencana Alam Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan drainase lingkungan dan jalan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan system jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan cakupan rumah tangga terlayani 1.577 rumah tangga. Bencana tanah Longsor dan Banjir Bandang yang terjadi di kab. Luwu Utara pada tahun 2020 mencakup 6 Kecamatan dengan total jumlah desa/kelurahan yang terdampak sebanyak 24 Desa/Kelurahan, berikut data yang terdampak dari bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kab. Luwu Utara:

Tabel II.4
Data Jumlah Kerusakan Akibat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang
Kab. Luwu Utara Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jumlah KK	Kondisi Kerusakan (Unit)			Jmlh Rmh
					Berat	Sedang	Ringan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masamba	8	18	876	430	24	426	880
2	Sabbang	4	10	211	29	10	163	202
3	Baebunta	3	11	1024	656	29	335	1020
4	Baebunta Selatan	3	17	456	1	63	388	452
5	Malangke	3	3	322	0	0	322	322
6	Malangke Barat	3	3	300	0	0	300	300
Total		24	62	3189	1116	126	1934	3176
Persentase (%)					35,14	3,97	60,89	

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan/rehabilitasi rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain pembangunan rumah layak huni melalui bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten bagi warga negara korban bencana, melalui program pengembangan perumahan dilaksanakan kegiatan pembangunan PSU pada lokasi Pembangunan rumah korban bencana di Kabupaten Luwu Utara dan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.5
Pembangunan PSU dan Jaringan Air Bersih

No	Paket Pekerjaan	Volume	Cakupan Rumah Tangga Terlayani
A	Pembangunan PSU Bagi Rumah Korban Bencana		
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba Utara, Kabupaten Luwu Utara	106 m	20 Ruta
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba Utara, Kabupaten Luwu Utara	160 m	20 Ruta
B	Pembangunan Sistem Jaringan Air Bersih pada Daerah Rawan Bencana		
1	Kota Makassar		
-	Balang Tojang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala	3.250 m	250 Ruta
2	Kabupaten Gowa		
-	Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan	1.150 m	176 Ruta
-	Desa Jonjo, Kecamatan Parigi	1.300 m	200 Ruta
-	Desa Majannang, Kecamatan Parigi	1.680 m	180 Ruta
-	Dusun Galla, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi	1.350 m	220 Ruta
-	Desa Lassa-Lassa, Desa Lassa-Lassa, Kecamatan Bontolempangan	1.700 m	176 Ruta
-	Kelurahan Lauwa, Kecamatan Bungaya	1.150 m	150 Ruta
-	Desa Mining Bohay, Kecamatan Parigi	1.600 m	225 Ruta

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.6
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi	%	-	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

3. Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 penanganan Kawasan kumuh di Sulawesi Selatan diamanatkan melalui Program Kawasan Permukiman dengan melakukan pembinaan penanganan Kawasan kumuh kabupaten/kota melalui kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha. Tahun 2020 Target dan Capaian Persentase kawasaan kumuh tertangani kewenangan provinsi telah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi, sehingga persentase capaian antara tahun 2019-2020 terjadi ketimpangan dari capaian tahun sebelumnya yang menggunakan Basis Data Kumuh 2016.

Pada tahun 2021 ditargetkan penurunan luas Kawasan kumuh sebesar 13,69% dari 1.183 Ha yang menjadi kewenangan provinsi. Capaian kinerja berupa tersusunnya Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan DED Revitalisasi Kawasan Kumuh pada 26 kawasan di 20 kabupaten/kota. Sementara untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha capaian penurunan luas kawasan kumuh sampai akhir tahun 2021 sebesar 18,03 persen dari total luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dilaksanakan melalui Pembangunan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Soppeng, dengan total panjang 1.730,17 m serta kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo dengan total panjang yang terbangun yaitu 1.1824,5 m, Pengadaan Sarana Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bantaeng berupa pengadaan 2 unit motor sampah diharapkan dapat mengurangi tingkat kekumuhan di Kabupaten Bantaeng.

Tabel II.7
Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO		LOKASI	VOLUME	
Kabupaten Bantaeng				
- Kecamatan Bantaeng (Kawasan Letta)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		214	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		554,8	m'
3	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah		1	Unit
- Kecamatan Bissapu (Kawasan Bontosunggu)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		183,3	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		207	m'
3	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah		1	unit
Kabupaten Bone				
- Kecamatan Tanete Riattang Timur (Kawasan Toro/Lonrae)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		217	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		257,6	m'
Kabupaten Wajo				
- Kecamatan Tempe (Kawasan Pacceang)				
1	Pemb. Jalan Lingkungan		131,1	m'
Kabupaten Soppeng				
- Kecamatan Lilirilau (Kawasan Macanre)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		401,3	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		130	m'
Kabupaten Enrekang				
- Kecamatan Enrekang (Kawasan Juppandang)				
1	Pemb. Jalan Lingkungan		64	m'
Kabupaten Gowa				
- Kecamatan Somba Opu (Kawasan Karetappa)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		84	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		167	m'
Kabupaten Luwu Timur				
- Kecamatan Nuha (Kawasan Nikel)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		182,57	m'
Kabupaten Pinrang				
- Kecamatan Paleteang (Kawasan Ongkoe)				
1	Pemb. Jaringan Drainase		447,2	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan		115	m'
- Kecamatan Paleteang (Kawasan Lerang-lerang)				
1	Pemb. Jalan Lingkungan		262	m'

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan diolah Tahun 2021

Tabel II.8
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	13,96	20,16	52,70	6,67	13,69	18,03

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan tersebar di 20 kabupaten/kota, 49 kecamatan, 90 kelurahan, serta 97 kawasan dengan luas total 1.183 Ha.

Tabel II.9
Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	KAWASAN	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6
I	Kabupaten Bantaeng No.SK 050/365/VI/2019				45,8
1		Bantaeng	Letta / Pallantikang	Sungai Celendu 2	15,2
2		Bantaeng	Karatuang	Karatuang	15,1
3		Bissappu	B. Sunggu, B. Lebang, B. Manai	Pesisir I	15,5
II	Kabupaten Bone No.SK 509/2018				67,61
1		T.Riattang Timur	Toro / Lonrae	Toro / Lonrae	14,79
2		T.Riattang Timur	Panyula	Panyula	13,16
3		T.Riattang	Biru	Biru	12,05
4		T.R.Barat	Macanang	Macanang	15,34
5		T.R.Barat	Majang	Majang	12,27
III	Kabupaten Bulukumba No. SK Kpts.188-45-481				10,84
1		Bontobahari	Darubiah	Kasuso	10,84
IV	Kabupaten Enrekang No.SK 376/KEP/VI/2014				15,62
1		Enrekang	Juppandang	Juppandang	15,62
V	Kabupaten Gowa No. SK 333/VI/2016				213,78
1		Somba Opu	Katangka	Katangka	10,9
2		Somba Opu	Katangka	Lakiyung	10,23
3		Somba Opu	Pandang-Pandang	Mangasa	10,57

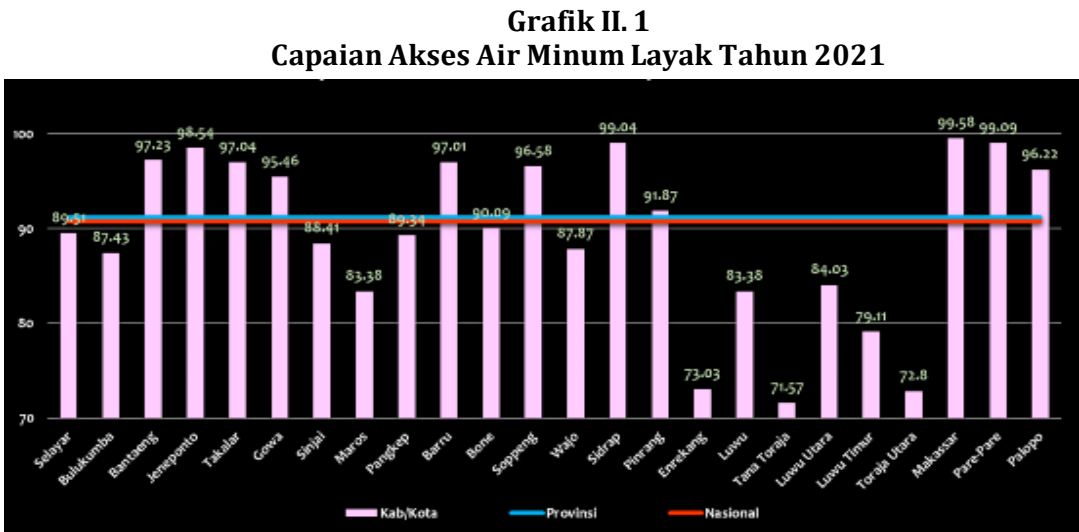
No	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	KAWASAN	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6
3		Tomoni	Tomoni	Tomoni	12,83
X	Kabupaten Luwu Utara No. SK. 188.4.45/465/VII/2017				70,7
1		Tanalili	Rampoang	Rampoang	10
2		Sabbang	Buntu Terpedo	Pantonangan	10
3		Sabbang	Buntu Terpedo	Padang Sarre	10
4		Sukamaju	Mojokerto	Pasar Spontan	15
5		Bonebone	Batang Tongka	Marobo	15,7
6		Bonebone	Pongko	Pongko	10
XI	Kabupaten Maros No.SK. 866/KPTS/0.50.13/II/2019				34,93
1		Maros Baru	Baji Pamai	Baju Bodoa	10,09
2		Lau	Allepolea	Balitjas	10,72
3		Turikale	Boribellaya	Boribellaya	14,12
XII	Kabupaten Pinrang No.SK 050/306/2019				53,4
1		Paleteang	Laleng Bata	Ammasangang	15,06
2		Paleteang	Pacongan	Seroja	10,5
3		Paleteang	Benteng Sawito	Lerang-Lerang	14,8
4		Paleteang	Macinnae	Ongkoe	13,04
XIII	Kabupaten Sidenreng Rappang No.SK 150/I/2019				36,27
1		Maritengngae	Sereang	Sereang	10,3
2		Maritengngae	Kanie	Kanie	14
3		Maritengngae	Takalasi	Takalasi	11,97
XIV	Kabupaten Sinjai No.SK 587 Tahun 2019				24,66
1		Sinjai Utara	Lappa	Lappa 01	14,46
2		Sinjai Utara	Tongke-Tongke	Babana	10,2
XV	Kabupaten Soppeng No.SK 664/X/2019				37,99
1		Lilirilau	Cabbengnge	Cabbengnge	12,42
2		Lilirilau	Macanre	Macanre	11,04
3		Marioriawa	Kaca	Kaca	14,53
XVI	Kabupaten Takalar No.SK 338 Tahun 2019				25,16
1		Pattallassang	Pallantikan/ Pattallassang/ Pappa	Pattallassang	15,12
2		Mangarabombang	Mangadu	Tamalate	10,04
XVII	Kabupaten Toraja Utara No.SK 334/X/2018				37,98
1		Tallunglipu	Rante Paku	Rante Paku	12,27
2		Tallunglipu	Tompo Tallunglipu	Tompo	13,87
3		Rantepao	Pasale	Pasale	11,84
XVIII	Kabupaten Wajo No.SK 675 Tahun 2019				59,72
1		Tempe	Salomenraleng	Bakke Alau	12,19
2		Tempe	Maddukelleng	Ammesangngeng	11,03

No	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	KAWASAN	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6
3		Tempe	Maddukelleng	Pacceang	13,26
4		Tempe	Sitampae	Bola Malimpong	12,38
5		Tempe	Atakkae	Tadampalie 01	10,86
XIX	Kota Makassar No.SK 826/654.2/Tahun 2018				77,92
1		Tamalate	Balang Baru	Balang Baru	16,31
2		Panakkukang	Tello Baru	Tello Baru	10,88
3		Tallo	Tallo	Agampaccaya	15
4		Tallo	Lakkang	Lakkang	11,57
5		Ujung Tanah	Barrang Lompo	Barrang Lompo	12,49
6		Tamalanrea	Kapasa	Kapasa	11,67
XX	Kota Palopo No.SK 311/VII/2019				95,03
1		Wara	Pajalesang	Pajalesang	13,38
2		Wara	Lagaligo	Lagaligo	13,48
3		Wara	Boting	Boting	14,31
4		Wara Timur	Malatunrung	Malatunrung	12,18
5		Bara	Buntu Datu	Buntu Datu	15,86
6		Bara	To'bulung	To'bulung	11,66
7		Mungkajang	Mungkajang	Mungkajang	14,16
Total	20 Kabupaten/ Kota	49 Kecamatan	90 Desa/Kelurahan	97 Kawasan	1183,79

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulawesi Selatan diolah Tahun 2021

4. **Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan**

Berdasarkan data BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 terhadap capaian akses air minum layak kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dari total 24 kabupaten/kota sejumlah 13 kabupaten masih berada dibawah rata-rata provinsi 91,18 persen serta rata-rata nasional 90,78 persen untuk capaian akses air minum layak yang digambarkan pada diagram berikut ini:



Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak layak yaitu bersumber dari sumur tidak terlindungi dan mata air tidak terlindungi, serta masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum dengan mengambil langsung dari air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, dll). Berdasarkan data Susenas 2021 sejumlah 35,34 persen sumber air minum rumah tangga bersumber dari air dalam kemasan namun akses terhadap air minum dalam kemasan dikategorikan rumah tangga dengan akses air minum layak jika rumah tangga dalam melakukan aktivitas masak, mandi dan mencuci masih menggunakan sumber air yang tidak layak. Tingginya persentase rumah tangga yang memilih air dalam kemasan sebagai sumber air minum utama khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan disebabkan karena selain lebih mudah diperoleh juga dinilai lebih *hygienis*.

Pemenuhan air bersih layak/ARSINUM di Kawasan pesisir dan kepulauan sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjulang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/jam atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun Prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT. Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah

tangga. Sehingga target persentase rumah tangga berakses air bersih layak/ARSINUM di Kawasan pesisir dan kepulauan tercapai 100 persen.

Tabel II.10
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

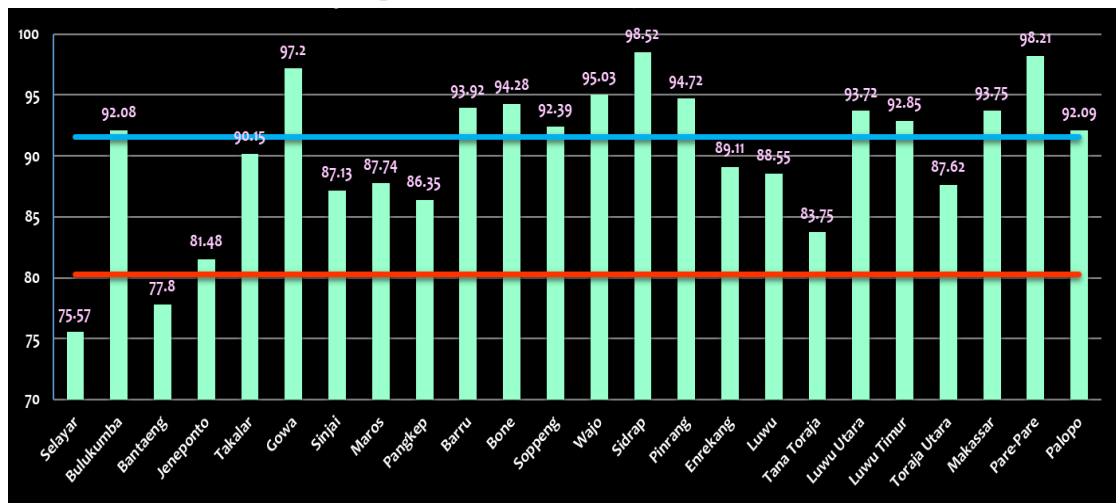
Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	-	-	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, 2021

5. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Di Kawasan Permukiman

Berdasarkan data BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 terhadap capaian akses sanitasi layak kabupaten/kota di Sulawesi Selatan digambarkan pada diagram berikut ini:

Grafik II. 2
Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021



Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan kembali pentingnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pedoman dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dalam lintas fungsi yang berkelanjutan dan terpadu. Sebagai salah satu kebutuhan dasar

masyarakat baik yang berada diluar permukiman umum maupun di Kawasan kumuh meliputi air bersih, drainase lingkungan (sanitasi) dan jalan lingkungan yang merupakan prasarana permukiman menjadi tanggungjawab negara agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak huni. Saat ini masih banyak polemik terkait ketersediaan atau sengketa lahan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga perencanaan awal lokasi sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan. Selain itu dengan terbitnya Permen LHK No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola maka segala bentuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur PSU permukiman wajib mempedomani hal tersebut maka dari itu dilakukan uji petik terkait pekerjaan dilapangan karena sampai saat ini belum dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait.

Tabel II.11
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase
1	Kepulauan Selayar	140.322	43.136	170.600	42,864	99,37
2	Bulukumba	448.218	148.499	468.194	113,364	76,34
3	Bantaeng	201.906	65.816	214.484	52,699	80,07
4	Jeneponto	415.462	126.901	491.294	111,153	87,59
5	Takalar	311.949	97.792	412.938	95,367	97,52
6	Gowa	768.868	230.891	955.413	219,635	95,12
7	Sinjai	266.479	79.717	293.090	65,276	81,88
8	Maros	388.738	115.540	503.834	112,212	97,12
9	Pangkep	352.229	106.740	455.418	101,883	95,45
10	Barru	189.877	61.383	248.667	59.066	96,22
11	Bone	813.211	246.078	1.044.449	235.767	95,81
12	Soppeng	237.875	79.714	281.379	70.698	88,69
13	Wajo	392.437	134.874	528.173	126.660	93,91
14	Sidrap	320.761	100.465	425.610	100.380	99,91
15	Pinrang	408.109	130.330	556.272	129.366	99,26
16	Enrekang	228.087	67.312	286.728	64.145	95,29
17	Luwu	372.876	110.937	496.761	107.992	97,35
18	Tana Toraja	270.597	79.578	306.917	70.072	88,06
19	Luwu Utara	329.934	102.486	429.410	100.564	98,13
20	Luwu Timur	304.938	92.660	380.657	88.115	95,10
21	Toraja Utara	255.140	75.289	311.278	67.376	89,49
22	Makassar	1.463.089	437.008	1.897.097	429.207	98,22
23	Pare Pare	154.524	45.827	204.822	45.719	99,77

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase
24	Palopo	183.056	56.715	253.689	55.391	97,67
	TOTAL	9.218.736	2.835.688	11.617.176	2.664.972	93,98

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tahun 2019 jumlah rumah tangga yg tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 2.032.113 Rumah Tangga sedangkan jumlah rumah tangga yang bersanitasi yaitu sebesar 1.824.220 atau sebesar 89,77 persen, tahun 2020 capaian rumah tangga yang berakses sanitasi mengalami peningkatan sebesar 93,79 atau sebesar 1.922.346 Rumah Tangga sedangkan untuk tahun 2021 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 2.664.972 atau sebesar 93,98 persen. Pada tahun 2021 pencapaian target persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman melebihi target dengan capaian 93,98 persen mengalami peningkatan 0,2 persen dari tahun 2020. Penyediaan PSU Permukiman berupa pembangunan drainase lingkungan dalam rangka peningkatan rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman dilaksanakan pada 6 Kabupaten dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel II.12
Pembangunan Drainase Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Lokasi	Volume	Cakupan Rumah Tangga Terlayani
Kabupaten Luwu			
1	Desa Balla Kecamatan Bajo	234 m'	34
2	Desa Mario Kecamatan Ponrang	240 m'	35
3	Desa Puty Kecamatan Bua	255 m'	36
4	Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa	230 m'	32
5	Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo	240 m'	34
		1.199 m'	171
Kota Palopo			
1	Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara	243 m'	35
2	Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara	226 m'	33
3	Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan	243 m'	35
4	Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwania	247 m'	36
5	Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan	247 m'	36
6	Kelurahan Balandai Kecamatan Bara	250 m'	36
		1.456 m'	211

No	Lokasi	Volume	Cakupan Rumah Tangga Terlayani
Kabupaten Luwu Utara			
1	Desa Pombakka Kecamatan Masamba	126 m'	18
		126 m'	18
Kabupaten Luwu Timur			
1	Desa Kalatiri Kecamatan Burau	130 m'	19
		130 m'	19
Kabupaten Tana Toraja			
1	Kawasan Permukiman Tondong Mallu Kecamatan Makale	215 m'	31
		215 m'	31
Kabupaten Toraja Utara			
1	Kawasan Permukiman Bt.Mamullu Kecamatan Kepala Pitu	209 m'	30
2	Kawasan Permukiman Ba'tan Kecamatan Kessu'	158 m'	23
3	Kawasan Permukiman Salu Sarre Kecamatan Sopai	209 m'	30
		576 m'	83
Total Keseluruhan		3.702 m'	533 RT

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, 2021

Tabel II.13
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Ruta	1.713.087	1.729.089	1.824.220	1.922.346		2.664.972
Jumlah rumah tangga	Ruta	2.029.478	2.048.450	2.032.113	2.049.645		2.835.688
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	84,41	89,77	93,79	91,00	93,98

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

6. Persentase Panjang Jalan Lingkungan Yang Terbangun Di Kawasan Permukiman

Dengan diberlakukannya Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka segala aturan teknis tentang hibah dan bansos telah dicabut, oleh karena itu melalui proses penganggaran yang telah disepakati pada Permendagri No. 90 tahun 2020 dan Kepmen No.050-3708 Tahun 2020, maka pelaksanaan penyelenggaraan PSU

Permukiman terkait air bersih dan jalan lingkungan dapat dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Pada tahun 2021 telah terbangun jalan lingkungan pada 10 kawasan dengan total panjang jalan lingkungan yang terbangun 1.788 m pada 11 kawasan di 5 kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14
Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Lokasi	Volume	
Kabupaten Luwu			
1	Kelurahan Balo Balo Kecamatan Belopa	195	m'
Kota Palopo			
1	Kelurahan Balandai Kecamatan Bara	220	m'
Kabupaten Tana Toraja			
1	Kawasan Permukiman Lempangan Tampak Lua Bungin Kecamatan Makale Utara	260	m'
2	Kawasan Permukiman Rantekalua Kecamatan Mangkendek	189	m'
3	Kawasan Permukiman Lipungan Tanete Kecamatan Kurra	185	m'
Kabupaten Toraja Utara			
1	Kawasan Lembang Bua Kecamatan Kesu	178	m'
Kabupaten Bulukumba			
1	Kelurahan Benjala (Jalan Lorong Gudang)	100	m'
2	Desa Lembanna (Jalan Taheo)	161	m'
3	Desa Ara (Jalan Tinadung Ruas 2)	100	m'
4	Kelurahan Sapolehe (Jalan Jana)	100	m'
5	Desa Lembanna (Jalan Goa Pasea Ruas 2)	100	m'
Total Keseluruhan		1.788	m'

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2021

Tabel II.15
Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun di Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	-	-	17,10	17,10	60,00	195,90

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

7. Persentase Pengembang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Menengah Yang Tersertifikasi Dan Terregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dalam meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan maka perlu mengatur asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Proses Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya: a) Rapat awal persiapan penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan; b) Koordinasi awal bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); c) Koordinasi awal bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); d) Koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; e) Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); f) Manghadiri Asistensi Penganggaran dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman di Manado; Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); g) Koordinasi lanjutan bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); h) Melakukan Study Tiru ke Semarang terkait Penyelenggaraan Standar Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; i) Koordinasi kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Tabel II.16
Persentase Pengembang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Menengah Yang Tersertifikasi Dan Teregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	14,29	7,15

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2021

B. Pertanahan

1. Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) pengadaan tanah dan 4 (empat) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Tahun 2018 fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 6 (enam) jenis pengadaan tanah dan diantaranya ada 1 (satu) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Untuk tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) pengadaan tanah yang bebrapa diantaranya hanya dilakukan perpanjangan penetapan lokasi, sedangkan tahun 2020 sejumlah 5 (lima) pengadaan tanah. Berdasarkan Perpres Nomor 190 Tahun 2020 bahwa Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan Perpanjangan dan Pembaruan Penetapan Lokasi jika Pengadaan tanahnya masih terus berjalan.

Pada tahun 2021 regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan tepat waktu didorong oleh pelaksanaan sosialisasi yang masif, koordinasi semua pihak yang berkepentingan serta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Faktor penghambat diantaranya alas hak pemilik lahan yang tidak lengkap atau terjadi sengketa kepemilikan, terjadi penolakan dan gugatan terkait dengan nilai yang ditetapkan oleh Appraisal, pemilik tidak diketahui keberadaannya dan adanya provokasi dari pihak yang berkepentingan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala yang besar dilaksanakan secara multiyears karena luasnya lahan yang diperlukan, banyaknya pemilik bidang tanah serta anggaran yang diperlukan.

Tabel II.17
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	160	100	140	83,30	100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2. Persentase Sengketa Tanah Negara Kewenangan Provinsi yang Difasilitasi

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2017 terdapat 7 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 70 persen. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2018 terdapat 6 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 60 persen. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2019 terdapat 10 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100 persen. Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi tahun 2021 sejumlah 10 pengaduan. Capaian target sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan 20% dari tahun sebelumnya.

Tabel II.18
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	70	60	100	83,33	100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

3. Persentase Penatagunaan Tanah Sesuai Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah di 24 Kab/Kota

Kegiatan penatagunaan tanah mulai diprogramkan pada tahun 2021, telah dilaksanakan konsolidasi penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar awal penyusunan Dokumen Data Base Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen Data Base Pertanahan akan memberikan informasi terkait dengan Penatagunaan Pertanahan dan kondisi Pertanahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen Data Base Pertanahan akan terus dilakukan perbaikan dan pembaruan setiap tahun sesuai dengan data dan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Tabel II.19
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian Kinerja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 20
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan I Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.29)

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100		100	100	100	100	100	100
						Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100		100	100	100	100	100	100
1	4	2	01.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	Dokumen	15		5	15	300	5	15	93,75
1	4	2	01.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	Dokumen	3		1	11	1.100,00	1	11	275

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	2	01.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	2	01.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah berdasarkan tingkat kerusakan akibat bencana	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	2	01.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan penerima rumah korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah hasil verifikasi	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	2	01.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen hasil pendataan Rumah sewa milik masyarakat, Rumah susun dan Rumah Khusus yang termamfaatkan sebagai bahan informasi perumahan	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	2	01.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Orang	540		150	197	131,33	195	197	36,48
1	4	2	01.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat /sukarelawan tanggap bencana	Orang	150		50	75	150	50	75	50
1	4	2	01.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	Orang	150		50	72	144	50	72	48
1	4	2	01.02	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPRFLPP	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Akses pembiayaan Perumahan Bersubsidi KPR FLPP	Orang	150		50	50	100	50	50	33,33

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	2	01.02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk	Tim	3		3	3	100	3	3	100
						Jumlah SDM yang terlatih sebagai TIM Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang	90		0	0	0	45	0	0
1	4	2	01.02	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana yang mengikuti rembug warga	Orang	75		25	25	100	25	25	33,33
1	4	2	01.02	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi yang dilakukan untuk menyepakati penerima dan jenis layanannya	Kali	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	2	01.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	Unit	88		20	20	100	28	20	22,22
1	4	2	01.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit	88		20	20	100	28	20	22,73
1	4	2	01.03	2	Penyusunan Site Plan danatau Detail Engineering Design DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen DED rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	%	36,37		13,69	18,03	131,7	23,42	18,03	49,57
1	4	3	01.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	3		1	2	200	1	2	66,67
1	4	3	01.01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah aparat dan KSM yang mengikuti bimtek/sosialisasi	orang	600		200	0	0	200	0	0

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	3	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan PemugaranPeremajaanPermukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/Peremejaan/Permukiman Kembali permukiman kumuh	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	3	01.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	3	01.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha	300		80	136,93	171,16	100	136,93	45,64
1	4	3	01.02	1	Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED PeremajaanPemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah dokumen DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh kewenangan provinsi	Dokumen	27		9	26	288,89	9	26	96,3
1	4	3	01.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	Kawasan	27		9	10	111,11	9	10	37,04
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	93		91	93,98	103,27	92	93,98	101,23
						Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	%	100		100	100	100	100	100	100
						Persentase panjangjalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	100		60	195,9	326,5	80	195,9	195,9

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	5	01.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	Kawasan	48		11	32	290,91	16	32	66,67
1	4	5	01.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU Air Bersih Layak / Arsinum permukiman	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU drainase permukiman	Dokumen	3		1	4	400	1	4	133,33
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan permukiman	Dokumen	3		1	3	300	1	3	100
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU fasilitas umum permukiman	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	5	01.01	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Fasilitas Umum permukiman yang terbangun	Kawasan	3		0	0	0	1	0	0
						Jumlah PSU Drainase permukiman yang terbangun	Kawasan	21		5	17	340	10	17	56,67
						Jumlah PSU Jalan Lingkungan permukiman yang terbangun	kawasan	9		2	11	550	3	11	122,22
						Jumlah PSU Air Bersih Layak / Arsinum permukiman yang terbangun	Titik	15		4	4	100	5	4	26,67
1	4	5	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Permukiman	Rekomendasi	3		1	6	600	1	6	200
1	4	5	01.01	5	Kerja Sama Penyediaan Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah kawasan PSU Permukiman yang dikerjasamakan	Kawasan	3		1	1	100	1	1	33,33

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100		14,29	7,15	50,03	100	7,15	7,15
1	4	6	01.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	Pengembang	35		5	0	0	15	0	0
1	4	6	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	Kali	30		12	9	75	9	9	30
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	% % %	100 100 100		100 100 100	99 100 100	99 100 100	100 100 100	99 100 100	99 100 100
1	4	1	01.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100		100	100	100	100	100	100
1	4	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Pokok yang disusun dan ditetapkan Jumlah dokumen Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen Dokumen	3 3		1 1	1 1	100 100	1 1	1 1	33,33 33,33
1	4	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100		100	100	100	100	100	100
1	4	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	Bulan	12		12	12	100	12	12	100
1	4	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen anggaran hasil pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang benar dan lengkap sesuai standar keuangan	Dokumen	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	Dokumen	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	1	20

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	1	20
						Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12		4	5	125	4	5	41,67
1	4	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Laporan	3		1	2	200	1	2	40
1	4	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan	Laporan	3		1	1	100	1	1	20
1	4	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
						Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pasang	357		119	0	0	0	0	0
1	4	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan dikelola administrasi kepegawaianya	Orang	119		119	106	100	119	106	89,07
1	4	1	01.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	Orang	119		119	106	100	119	106	89,07
1	4	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	60		20	20	100	20	20	100
1	4	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	66		22	22	100	22	22	33,33
1	4	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	60		20	4	20	20	4	6,67
1	4	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	jenis	36		12	12	100	0	12	30
1	4	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	Jenis	48		16	16	100	16	16	33,33
1	4	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	3		1	0	0	0	0	0
1	4	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia	Jenis	6		2	0	0	0	0	0
1	4	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air, listrik dan Wifi	Bulan	12		12	12	100	12	12	100
1	4	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	3		1	1	100	1	1	33,33
1	4	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	10		10	10	100	10	10	100
1	4	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	6		6	10	166,67	6	10	41,67
1	4	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	Unit	3		1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
						Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
2	10	3		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100		100	100	100
2	10	3	01.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Lokasi	15		3	3	100
2	10	3	01.01	1 Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	3		1	3	300
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100		100	100	100
2	10	4	01.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	Kasus	18		5	10	200
2	10	4	01.01	1 Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa pertanahan yang difasilitasi	Data	18		5	10	200
2	10	4	01.01	2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa tanah yang dimediasi	Data	18		5	10	200
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100		100	100	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program /kegiatan/sub kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
						Target renja tahun 2021	Realisasi renja tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 10 10 01.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
2 10 10 01.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	3		1	1	100	1	1	33,33
2 10 10 01.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi	Kali	15		5	5	100	5	5	33,33

Sumber : E-Monev Prov.Sulsel, diolah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

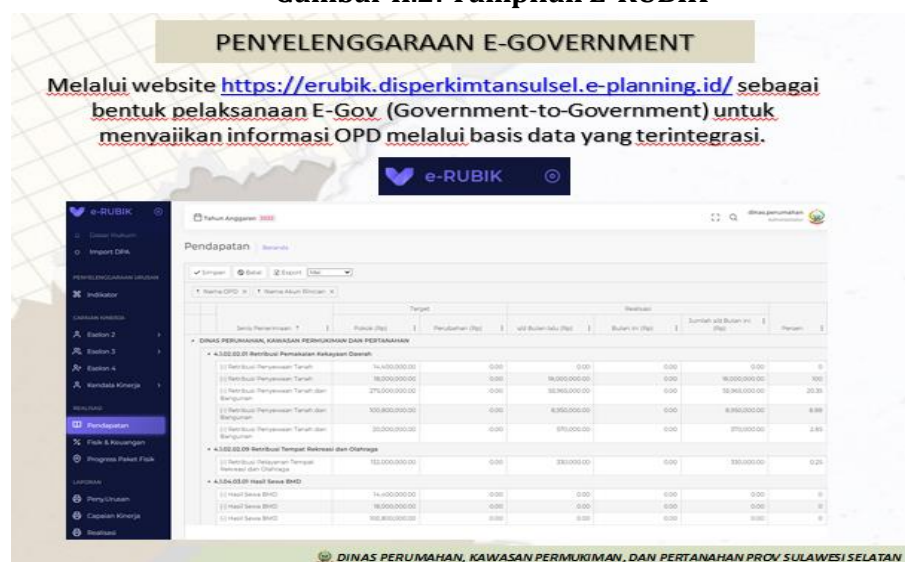
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel berdasarkan tugas dan fungsi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Program 17 (tujuh belas kegiatan) dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2021 berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dengan hampir semua Program Kegiatan dan sub kegiatan mampu mencapai target bahkan ada yang mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan, meski demikian juga masih terdapat beberapa sub kegiatan yg capaiannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Program kegiatan yang mencapai target Kinerja berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terbagi atas 8 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri 5 Sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan uraian yaitu Dokumen Rencana Kerja (Pokok Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2021), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan, Dokumen DPA Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja. Selain itu pada tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan membuat aplikasi **E-RUBIK** yaitu Rumah Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja yang telah terintegrasi dengan *E-Planning (E-Money)* Prov. Sulsel.

Gambar II.2: Tampilan E-RUBIK



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri atas 3 Sub kegiatan dengan capaian kinerja sebanyak 5 Dokumen.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas 4 Sub kegiatan yang rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada sub kegiatan Pengadaan Baju Dinas beserta Atributnya, Pengadaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD)
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas 4 Sub kegiatan yang rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hal tersebut disebabkan Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan yang ditetapkan dalam DPA sudah tidak tersedia pada E-Katalog.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Meubel tidak dilaksanakan akibat Refocusing Anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksana.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 100%

2. Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 13 Sub kegiatan

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

Telah tersusun dokumen data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi pada Kab/kota yang berisi gambaran lokasi kejadian, jenis bencana, tingkat kerawanan bencana (rendah, sedang, tinggi), luas perumahan (Ha), Jumlah rumah (unit). Dokumen Identifikasi yang tersusun sebanyak 10 Dokumen berdasarkan kabupaten/Kota yaitu Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Pangkep, Kab. Sinjai, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara. Selain

Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana juga telah tersusun 1 Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU Air Bersih di Lokasi Rawan Bencana untuk Kab. Gowa. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 11 Dokumen dari target 3 Dokumen atau sebesar 275%.

- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Telah tersusun Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani yang berisi tentang Jenis Bencana, Tahun terjadinya bencana, Lokasi, Nama KK, NIK, Jumlah anggota keluarga, Kondisi ekonomi keluarga (MBR/Non MBR), Tingkat kerusakan rumah (ringan, sedang, berat) dan Status Kepemilikan Rumah. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 1 Dokumen dari target 3 Dokumen atau sebesar 33.33%.

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Telah tersusun dokumen pendataan jumlah rumah yang terkena bencana alam, Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana, Pendataan Kerusakan rumah (*Form A dan B*), Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 1 Dokumen dari target 3 Dokumen atau sebesar 33.33%.

- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus

Telah tersusun dokumen yang memuat tentang data lokasi rumah sewa (alamat rumah, jumlah rumah sewa, kondisi fisik rumah sewa, tarif sewa perbulan, pemilik rumah sewa), Rumah susun (lokasi, jumlah rusun, jumlah RT, KK dan jiwa, Kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) dan rumah khusus (Lokasi jumlah unit, jumlah RT, KK dan jiwa, kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) Berupa dokumen data yang memuat tentang lokasi rumah sewa (Alamat Rumah, jumlah rumah sewa, kondisi fisik rumah sewa, tarif sewa perbulan, pemilik rumah sewa),

Rumah susun (Lokasi, Jumlah Rusun, Jumlah RT, KK dan jiwa, Kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) dan rumah khusus (Lokasi jumlah unit, jumlah RT, KK dan jiwa, kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola). Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 1 Dokumen dari target 3 Dokumen atau sebesar 33.33%.

b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Sukarelawan Tanggap Bencana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memberikan advokasi dan informasi terkait Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 75 Orang dari target 150 Orang atau sebesar 50%.

- Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan

Telah dilaksanakan Sosialisasi tentang mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan yang melibatkan *stakeholder* dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini dimaksudkan meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan dan bertujuan untuk terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 72 Orang dari target 150 Orang atau sebesar 48%.

- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel telah *melaunching website* Halo Rumah Idamanku yang mana pada *Website* tersebut telah tersedia data dan informasi terkait dengan Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 50 Orang dari target 150 Orang atau sebesar 33.33%

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel telah membentuk Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi tingkat kerusakan rumah dalam rangka penyusunan rencana aksi. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 3 Tim dari target 3 Tim atau sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan Rapat bersama pemerintah setempat dalam rangka penentuan Calon Penerima Rumah Bagi Korban bencana. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 25 Orang dari target 75 Orang atau sebesar 33.33%

c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan drainase lingkungan dan jalan lingkungan di lokasi Hunian Tetap (hunatap) bagi korban Bencana di Kabupaten Luwu Utara yang telah direlokasi dengan cakupan rumah tangga terlayani sebangak 20 RT serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan cakupan rumah tangga terlayani 1.577 rumah tangga. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 20 Unit dari target 88 Unit atau sebesar 22.73%

- Penyusunan *Site Plan* dan/atau *Detail Engineering Design* DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Terjadinya *Refocusing* Anggaran pada Pekerjaan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana mengakibatkan DED Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana juga tidak dapat dilaksanakan, sehingga dokumen yang dihasilkan pada Sub Kegiatan ini hanya berupa Laporan pelaksanaan kegiatan. Belum Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 sebanyak 3 Dokumen.

3. Program Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh

Sub kegiatan ini tidak terlaksana akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19*. Belum Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 sebanyak 600 orang.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran Perumahan Permukiman Kembali Permukiman kumuh

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam penanganan Kawasan dan Permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi ke Kabupaten/Kota, Kementerian dan Instansi terkait lainnya mengenai Sinkronisasi data target dan capaian kumuh juga melakukan Verifikasi dan *update* data luas Kawasan Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 1 Laporan Koordinasi dari target 3 Laporan atau sebesar 33.33%

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.073 Ha di mana terdapat 1.183 Ha yang penanganannya menjadi kewenangan Provinsi. Dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini juga di fasilitasi oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas inisiasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel melakukan rapat-rapat Koordinasi dengan menghadirkan OPD Kab/kota yang terkait dengan Permukiman dan Kawasan Kumuh, juga melakukan upaya langkah-langkah kerjasama dengan Perusahaan melalui program

tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau *Coorporate Social Responsibility (CSR)*. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 1 Laporan Koordinasi dari target 3 Laporan atau sebesar 33.33%

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* DED Peremajaan Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha.

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini berupa tersusunnya Dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) dan DED Revitalisasi Kawasan Kumuh pada 26 kawasan di 20 kabupaten/kota. Capaian Kinerja Sub kegiatan berdasarkan target pada perubahan Renstra 2018-2023 telah tercapai sebesar 26 dokumen dari target 27 Dokumen atau sebesar 96.3%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

Capaian penurunan luas kawasan kumuh sampai akhir tahun 2021 sebesar 18,03% dari total luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi yang pendanaannya merupakan kolaborasi antara APBD Prov. Sulsel dan APBN. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dilaksanakan melalui Pembangunan Jalan Lingkungan dengan total panjang 11.824,5m di Kab. Bantaeng, Kab. Bone, Kab. Enrekang, Kab. Gowa, Kab. Soppeng, dan Kab. Wajo, Pembangunan Drainase Lingkungan dengan total panjang 1.730,17m di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Soppeng, serta pengadaan 2 Unit Motor Sampah di Kabupaten Bantaeng yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kekumuhan pada kawasan tersebut. Jumlah kawasan tertangani pada tahun 2021 sebanyak 10 Kawasan sehingga capaian kinerja berdasarkan target pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah 37.04% dari 27 kawasan yang ditargetkan pada akhir periode renstra.

4. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

Dokumen Perencanaan yang tersusun pada sub kegiatan ini sebanyak 11 Dokumen yaitu Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU pada 6 Kab/Kota diantaranya Kab. Bulukumba, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Pinrang, Kota Parepare dan Kabupaten Luwu Utara, selain itu juga tersusun Dokumen DED Pembangunan PSU pada Kab. Sinjai, Kab. Pinrang, Kab. Jeneponto dan Kab. Bulukumba serta 1 Dokumen UKL-UPL Kab. Pinrang. sehingga capaian kinerja berdasarkan target pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah 11 Dokumen dari 12 Dokumen yang ditargetkan pada akhir periode renstra.

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman

Prasarana Air Bersih yang terbangun sebanyak 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Capaian kinerja sesuai target pada perubahan Renstra tahun 2018-2023 telah tercapai sebesar 4 titik dari target sebesar 15 kawasan atau sebesar 26.67%

Penyediaan PSU Permukiman berupa pembangunan drainase lingkungan dalam rangka peningkatan rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman dilaksanakan pada 6 Kabupaten yaitu Kab. Luwu sebanyak 5 Kawasan, Kota Palopo sebanyak 6 Kawasan, Kab. Luwu Utara sebanyak 1 Kawasan, Kab. Luwu Timur sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Tana Toraja sebanyak 1 Kawasan dan Kabupaten Toraja Utara sebanyak 3 Kawasan dengan total Panjang 3.702 m'. Capaian kinerja sesuai target pada perubahan Renstra tahun 2018-2023 telah tercapai sebesar 17 Kawasan dari target sebesar 21 kawasan atau sebesar 80.95%

Pembangunan jalan lingkungan pada 10 kawasan dengan total panjang 1.788 m pada 11 kawasan di 5 kabupaten yaitu Kab. Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Bulukumba. Capaian kinerja sesuai target pada perubahan Renstra tahun 2018-2023 telah tercapai sebesar 11 Kawasan dari target sebesar 9 kawasan atau sebesar 122.22%

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Koordinasi dan Sinkronisasi yang telah dilakukan menghasilkan Rekomendasi Rencana Kebutuhan PSU utamanya pada Kawasan Penyanggah Ibu kota Kabupaten. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 6 rekomendasi untuk 6 Kab./Kota yaitu Kab. Bulukumba, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Pinrang, Kota Parepare dan Kab. Luwu Utara. Capaian kinerja berdasarkan target pada perubahan Renstra sebesar 200% atau 6 Rekomendasi dari target 3 Rekomendasi.

- Sub kegiatan Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Kerjasama yang dilaksanakan yaitu berupa penyediaan PSU Permukiman berupa Jalan Lingkungan sebanyak 5 Kawasan di Kab. Bulukumba dimana hasil kesepakatan menyimpulkan bahwa pihak Pemda Bulukumba menyediakan Dokumen DED dan Pihak Pemerintah Provinsi melaksanakan penyediaan PSUnya. Capaian kinerja berdasarkan target pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebesar 33.33% atau 1 Kawasan dari target 3 Kawasan pada akhir periode Renstra.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- a. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

- Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Fasilitasi Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pada Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Pengadaan Tanah. Akhir tahun 2021 diajukan kepada Gubernur 2 (dua) Permohonan Penetapan Lokasi rencana pengadaan tanah Program Startegis Nasional yang telah ditindaklanjuti

Tahapan Pengadaan Tanahnya sesuai dengan regulasi yang mengatur maka dilaksanakan 4 Tahapan Pengadaan tanah yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil sehingga proses pelaksanaan Tahapannya dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Bendungan Paselloreng Seluas $\pm$ 222,83 Ha di Kab. Wajo
2. Pembangunan Jaringan Irigasi Gilireng Seluas $\pm$ 205,86 Ha di Kabupaten Wajo
3. Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track Jalur Kereta Api Makassar-Parepare seluas $\pm$ 173 Ha
4. Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas 83,94 Ha
5. Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas $\pm$ 307,27 Ha

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu Daerah Provinsi

Data yang tersusun merupakan Rekapitulasi data sengketa pertanahan yang difasilitasi.
 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Provinsi

7. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan penatagunaan tanah mulai diprogramkan pada tahun 2021, telah dilaksanakan konsolidasi penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar awal penyusunan Dokumen Data Base Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen Data Base Pertanahan akan memberikan informasi terkait dengan Penatagunaan Pertanahan dan kondisi Pertanahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen *Database* Pertanahan akan terus dilakukan perbaikan

dan pembaruan setiap tahun sesuai dengan data dan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

B. Program Kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan

8. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

Proses Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya: a) Rapat awal persiapan penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan; b) Koordinasi awal bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); c) Koordinasi awal bersama Persatuan Perusahaan *Realestate* Indonesia (REI); d) Koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; e) Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Persatuan Perusahaan *Realestate* Indonesia (REI); f) Menghadiri Asistensi Penganggaran dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman di Manado; Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); g) Koordinasi lanjutan bersama Persatuan Perusahaan *Realestat* Indonesia (REI); h) Melakukan Study Tiru ke Semarang terkait Penyelenggaraan Standar Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; i) Koordinasi kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

C. Faktor yang menjadi penghambat capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan terkait perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- b. Terjadinya *Refocusing* Anggaran akibat Pandemi Covid-19.

D. Faktor penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2021 antara lain :

- a. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik
- b. Besarnya komitmen pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Meningkatnya pemahaman pejabat struktural dan fungsional serta staf tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Adanya *Standart Operational Procedure (SoP)* berbasis Sub Bagian dan Seksi di Lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Kinerja telah dijabarkan (*cascading*) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan staf;
- f. Tingginya minat SDM saat ini untuk memahami kinerja dan implementasinya;

E. Implikasi yang timbul terhadap target pada sasaran renstra Dinas Perkimtan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terselenggara dengan baik
- b. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi
- c. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
- d. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya.

- b. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala
- c. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
- d. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pembagian anggaran kas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tepat waktu.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.
- f. Diharapkan dalam menelaah usulan agar lebih cermat dan memperhatikan kesiapan lokasi pekerjaan, dan juga apabila diperlukan dilakukan kunjungan lokasi terlebih dahulu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**". Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok Visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter".

Berdasarkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 tersebut di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat terkait dalam pencapaian Visi pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan kedalam 5 Misi meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Misi 1, Misi 2 dan Misi 3 yang terkait dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 diuraikan:

1. Tujuan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pencapaian SPM Bidang Perumahan.
 - b. Meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman.
 - c. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi
 - b. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
 - c. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak.
3. Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut.
 - a. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni.
 - b. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya.
 - c. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

4. Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Penunjangnya bagi Masyarakat Korban Bencana Skala Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi.
 - b. Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan.
 - c. Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tabel II.21
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel (Tc. 30)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analistis
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	-		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	-		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
3	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	100%		14,29%	57,14%	100%	7,15%		100%	Tidak Mencapai Target
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		36.37%		13.69%	23.42%	36.37%	18.03%		36.37%	Melebihi Target
5	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman		93%		91%	92%	93%	93,89		93%	Melebihi Target
6	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		100%		60%	80%	100%	195.9%		100%	Melebihi Target
7	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100%		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
8	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi		100%		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
9	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota		100%		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
10	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		100%		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target
11	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100%		100%	100%	100%	100%		100%	Mencapai Target

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analistis
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
12	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100%		100%	100%	100%	73,63%		100%	Tidak Mencapai Target
13	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota		100%		100%	100%	100%	93,80%		100%	Tidak Mencapai Target
14	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.			100%	92,4%		100%	91,18%		100%	Tidak Mencapai Target
15	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.			87,6%	82,10%		87,6%	86,75%		87,6%	Mencapai Target
16	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah)			PM	PM	PM	PM	0,97%		PM	Mencapai Target
17	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak			89,62%	78,70%		89,62%	91,18%		89,62%	Mencapai Target
18	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			93,55%	87,8%		93,55%	91,57%		93,55%	Mencapai Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 3,24% (yoy) pada triwulan III 2021, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,66% (yoy). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun pertumbuhan terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran *Covid-19* varian delta, sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mall dan toko ritel, serta aktivitas *MICE* (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions*) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan *Covid-19* dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan berlanjut serta meningkat pada triwulan IV 2021, meskipun akan sedikit tertahan oleh rencana penerapan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional ditengah risiko varian *Omicron COVID-19* yang perlu diwaspadai. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kembali bekerja. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga di berbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan.

Isu-isu strategis berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan terkait pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi faktor dalam penentuan Program Kegiatan dapat dijabarkan melalui beberapa point berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

- 1) Belum optimalnya Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)

- 2) Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
- 3) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan keterbatasan akses pembiayaan
- 4) Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
- 5) Belum terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi layak

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Pertanahan

- 1) Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.
- 2) Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan, kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan ijin penetapan lokasi;
- 3) Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- 4) Masih banyaknya ijin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya.

Berdasarkan Isu-isu strategis atau permasalahan yang telah diuraikan di atas terkait Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman.
- 2) Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi.
- 3) Mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni, infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan berkualitas serta responsive gender dan ramah anak.
- 4) Meningkatkan penyediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum.
- 5) Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulsel Tahun 2023 merupakan Pedoman sebagai langkah awal bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan yang berisi program dan Kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan Program yang tepat sasaran. Selain berpedoman pada Ranwal RKPD pelaksanaan Forum Perangkat Daerah juga diharapkan mampu memberikan masukan dalam rangka penajaman target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2023.

Rancangan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2023 pada Ranwal RKPD Tahun 2023 sebesar **Rp.51.936.929.055,-** dan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Program Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.22
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc. 31)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				51.936.929.055	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				208.998.819.055	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				50.390.571.423	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				202.452.461.423	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)	100% 100%	4.687.829.496	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)	100% 100%	22.437.829.496	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen	1.090.080.584	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen	1.090.080.584	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	225.763.012	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	225.763.012	
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	102.352.524	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	102.352.524	
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	104.381.024	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan rumah	1 Dokumen	104.381.024	
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	98.791.024	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	98.791.024	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	558.793.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	558.793.000	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	195 orang	592.228.400	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	195 orang	592.228.400	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	258.968.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	258.968.000	
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50 Orang	258.968.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50 Orang	258.968.000	
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	58.968.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	58.968.000	
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	45 Orang	4.754.400	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	45 Orang	4.754.400	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	3.810.000	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	3.810.000	
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	1 Dokumen	6.760.000	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	1 Dokumen	6.760.000	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	40 Unit	3.005.520.512	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Benc ana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	125 Unit	20.755.520.512	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terehabilitasi	40 Unit Rumah	2.833.069.512	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terehabilitasi	125 Unit Rumah	20.383.069.512	ditambah Pemb. PSU pada Daerah Rawan Bencana (85 Lokasi)*
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	172.451.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen	372.451.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	36,37%	10.763.514.632	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	36,37%	93.805.404.632	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	1.334.821.560	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	1.334.821.560	
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	802.593.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	802.593.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	330.527.536	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	330.527.536	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	201.701.024	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	201.701.024	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas kawasan kumuh tertangani	120 Ha	9.428.693.072	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas kawasan kumuh tertangani	120 Ha	92.470.583.072	
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9 Dokumen	1.146.501.024	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9 Dokumen	1.346.501.024	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	120 Ha	8.282.192.048	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	120 Ha	91.124.082.048	- Pemb. PSU pada Kawasan Kumuh* - Peningkatan Kualitas RTLH (2152 unit)**
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	100%	9.765.813.300	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	100%	61.035.813.300	
		Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93%				Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93%		
		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100%				Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100%		
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	21 kawasan	9.765.813.300	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	161 kawasan	61.035.813.300	
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	828.641.536	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3 Dokumen	1.028.641.536	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman	21 Lokasi	8.661.352.228	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman	224 Lokasi	59.731.352.228	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	136.634.024	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	136.634.024	
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU Permukiman	1 Dokumen	139.185.512	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman	1 Dokumen	139.185.512	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	568.740.484	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	568.740.484	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	15 Pengembang	568.740.484	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	15 Pengembang	568.740.484	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah Kualifikasi Menengah	9 Laporan	568.740.484	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah Kualifikasi Menengah	9 Laporan	568.740.484	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100% 100% 100%	24.604.673.511	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100% 100% 100%	24.604.673.511	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	2.492.246.332	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	2.492.246.332	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.898.350.536	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.898.350.536	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	155.478.012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	155.478.012	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	96.107.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	96.107.500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.343.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.343.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.743.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.743.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	134.588.236	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	134.588.236	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	174.636.048	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	174.636.048	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100%	18.420.468.331	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100%	18.420.468.331	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	18.110.152.771	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	18.110.152.771	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.675.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.675.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	79.576.024	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	79.576.024	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.315.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.315.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.601.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.601.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	40.665.512	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	40.665.512	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.827.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.827.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	78.656.024	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	78.656.024	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	278.034.536	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	278.034.536	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	182.544.512	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	182.544.512	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.764.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.764.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	80.726.024	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	80.726.024	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	560.846.096	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	560.846.096	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	119 Paket	198.110.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	119 Paket	198.110.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	164.283.536	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	164.283.536	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	117.586.536	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	117.586.536	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80.866.024	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80.866.024	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	900.414.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	900.414.750	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8.903.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8.903.750	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	735.115.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	735.115.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	51.375.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	51.375.500	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	105.020.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	105.020.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	50.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	50.250.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	50.250.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	50.250.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	412.799.834	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	412.799.834	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	412.799.834	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	412.799.834	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1.489.613.632	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1.489.613.632	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	149.330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	149.330.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	201.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	201.780.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1.138.503.632	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1.138.503.632	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.546.357.632	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				6.546.357.632	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	173.342.048	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	5.173.342.048	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	7 lokasi	173.342.048	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	7 lokasi	5.173.342.048	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	173.342.048	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2 Dokumen	5.173.342.048	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100%	247.466.048	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100%	247.466.048	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	7 kasus	247.466.048	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	7 kasus	247.466.048	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Dokumen	127.053.024	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Dokumen	127.053.024	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	7 Berita Acara	120.413.024	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	7 Berita Acara	120.413.024	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	100%	1.125.549.536	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	100%	1.125.549.536	
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	1.125.549.536	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	1.125.549.536	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	131.644.024	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	131.644.024	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	993.905.512	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	993.905.512	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain itu terdapat pula Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD, ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 021/04/DPRD, perihal Penyampaian pokok-pokok Pikiran DPRD Prov. Sulsel tanggal 10 Januari 2022, yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel adalah Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman melalui penyediaan sarana prasarana perumahan yang layak, pengelolaan persampahan, penataan kota dan penanganan kawasan kumuh.

Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan dalam beberapa point penting, yaitu:

1. Masih terdapat usulan program kegiatan masyarakat yang belum dipahami oleh Kabupaten/Kota terkait kewenangan masing-masing Pemda maupun OPD
2. Perlu dilakukan penguatan terhadap dokumen persiapan (perencanaan) yang menjadi syarat Administrasi dan Teknis utamanya yang menjadi Program Prioritas Provinsi.

Berikut merupakan usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan berdasarkan hasil Validasi oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel: II. 23
Usulan Program kegiatan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Prov. Sulsel (TC.32)

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perumahan		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi		
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Penyediaan PSU Permukiman	Kota Makassar		1 Paket	
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten Gowa		1 Paket	
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten maros		1 Paket	
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten Takala		1 Paket	
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten Pangkep		1 Paket	
1.1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	1 Paket	
1.1.1	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
	Perenc. PSU Daerah Rawan Bencana	Mantadulu, Kec. Angkona Kab. Luwu Timur		1 Paket	
1.1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Bonto langkasa, Kec. Minasa Tene Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Pundata Baji, Kec. Labakkang Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Tamangngapa, Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Anrong Appaka, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Bonto Perak, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Desa Mangilu, Kec. Bungoro Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Kec. Bungoro Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Desa Julukanaya, Kec. Biringbulu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Kel. Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Bontosunggu, Desa Je'nebatu Kec. Bungaya Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Tombongi, Desa Lonjoboko Kec. Parangloe Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Desa Turungan Baji, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Kec. Maros Baru Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Perumnas Tumalia, Desa Adatongeng, Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Lingkungan Buttatoa Selatan, Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Lingkungan Pemukiman Darul Istiqamah, Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	kompleks perumahan papan lestari dan haji banca, Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Tonasa Kec. Sanrobone, Kab. Takalar		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Perumahan Relief Istiqamah, Desa Taroada Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Tulak Tallu, Kab. Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Mara dekaya Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Bontokassi, Desa Panrannuangku Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Kampung Beru, Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Bila caddi, Desa Mardekaya Kec. Pattallassang Kab. Takala		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Sabintang Kec. Pattallassang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Jl. Angkasa Pura RW 09 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Maccopa Desa Taroada Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	taniaga dan sekitarnya, Desa Taroada Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Desa Alliri Tengae Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Jl. Batua Raya No. 8 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassa		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Jl. Sejati Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Jl. Goa Ria Kel. Sudia ng Kec. Biringkanaya Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Jl. Poros Barombong, Dusun Bontopajja, Desa Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Dusun Kalukuang, Kel. Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	lingkungan pemukiman darul istiqamah bontoa, Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	lingkungan darul istiqamah maccopa, Kel. Taroadada Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Barru		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Wajo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Tanete, Kec. Simbang Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Bontolebang, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Aeng Towa, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Pallantikang, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Parang Baddo, Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Lassang Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Banggae, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Lakatong, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Taroadada, Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Jl. Angkasa Pura Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Jl. Pelita IV depan SD Inpres, Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Jl. Pelita Raya Lr. 3, Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Jl. Sungai Saddang Baru Lr. Mu'min 1, Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Tamalate, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Dusun paopance, Desa Lepingeng Kec. Belawa Kab. Wajo		1 Paket	
	Peningkatan Kualitas Kumah tidak Layak Huni	Tamalate, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman	Kelurahan Pettuadea, Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih /Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
1.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan		
1.1.2	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
	Penyusunan DED PSU Kawasan Permukiman	Kab. Maros		1 Paket	
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PSU drainase permukiman	Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan permukiman	Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Penyusunan DED PSU Kawasan Permukiman	Kabupaten Luwu		1 Paket	
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan permukiman	Kab. Toraja Utara			
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun paniroang, Kel./Desa Tanete, Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar	Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Cammado, Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Mangkaca, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	BTN AISYAH, Kelurahan Balangnipa, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Gandangbatu, Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jalan Lingkar Pasar dusun Bulusibalie, Desa ASKA, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tassiilu Manipi, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Bajang,Desa Gunturu, Kec. Herlang Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Tonasa, Desa Songing, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Lompu, Desa Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Pasar Wonokerto, Kec. Sukamaju Selatan Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Solojirang - Reda Beru, Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Kanaungan, Kec. Labakkang Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kompeks Regency Maros, Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kota Parepare		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Poros Sapan - Pulu" Pulu", Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Lagego, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Punaga, Kec. Mangarabombang Kab. Takala		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Boddia, Kec. Galesong Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Kantun Poya - Ikko Balao, Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Tondon Langi", Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Passeno 1, Kab. Sidenreng Rappang		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Baranti Wattang, Kab. Sidenreng Rappang		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Pajalesang, Kec. Lilirilau Kab. Soppeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Labessi, Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Batangge, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Borongloe, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Paccinongang, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Romangpolong, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Samata, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tombolo, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tamarunang, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Bontoramba, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Raya, Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Pacelle, Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Malino, Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Jeneponto		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Borongloe, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	BTN Sejahtera, Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lingkungan Bonto Balang, Kel. Tamaona Kec. Tombolopao Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Pannampu Lr. 2, Kel. Lembo Kec. Tello Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Pongtiku 1 Lr. 1, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Sunu Lr. 2, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Gatot Subroto 1 Lr. 1, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Ir. Juanda Lr. 2, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Pongtiku Lr. 8, Kota Makassar		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Mangadel Lr. 18, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Talion, Kec. Rembon Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Salu, Kec. Sopai Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Limbong, Kec. Rembon Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Tandung La'bo, Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Buntu La'bo, Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Kaero, Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Angkasa Lorong 4 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Perumahan Rajana Maros, Kec. Turikale Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Salu Induk Kecamatan Bua Ponrang , Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Malela Kecamatan Suli Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Rw 01/RT.01 Lrg. Dermawan Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Senga Selatan Kec. Bvelopa, Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Batu Tonglong, Desa Padang Kalua Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lebani, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lamunre, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Tampumia, Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. AMD Borong Jambu Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Tongkonan Basse, Kec. Buntao Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Tumbang Datu, Kec. Sangalla Utara Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Bori', Kec. Sesean Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Lorog 3 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	RT 004 RW 012 Kelurahan Borong, Kec. Manggala Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kompleks YPPKG Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Malero, Desa Biangloe, Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa balleanging, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	desa saohiring, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Baruppu Utara, Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Wonokerto, Kec. Sukamaju Selatan Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Kabba, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Pabundukang, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kec. Mamajang Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Benteng, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Perumahan Regency, Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Poros Buntu Pepasan Parandangan, Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Lagego, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Poros tanete kajang, Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Jl. Sangkurwira Dusun Lengkong, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Tambangan, Kec. Kajang Kab. Bulukumba		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Drainase	Jawi-jawi, Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Tanete, Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	poros kajang tambangan, Desa Sangkala, Kec. Kajang Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	jalan poros kajang sinjai, Desa Pattiroang, Kec. Kajang Kab. Bulukumba		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kampung Majennang, Kec. Balocci Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Wanasari, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Maramba, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Langkea Raya, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kab. Jeneponto		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Seriti, Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Lembang Kaero, Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Jl. Perintis Kemerdekaan VI Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Lebani, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Dusun Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kec. Ponrang Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Libukang Mandiri, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Drainase	Desa Paconne, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Lebani, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Lare-lare, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Drainase	Desa Mangadu Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Bontona Rikja, Desa Tanete, Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar	Sumur Bor yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Tile-tile, Desa Patikarya, Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar	Sumur Bor yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Tenro, Desa Bontolempangan, Kec. Buki Kab. Kepulauan Selayar	Sumur Bor yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Alasa, Desa Mekar Indah Kec. Buki Kab. Kepulauan Selayar	Sumur Bor yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Desa saohiring, Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Parak, Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Lakawali Pantai, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Tana Toraja, Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Toraja Utara, Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	dusun 2 uloe, Desa Botto Kec. Pitu Raise Kab. Sidenreng Rappang		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Lembang Buntu La'bo, Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Lembang Kaero, Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Kelurahan Bulurokneng Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih	Mahalona Towuti, Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan RTH Kawasan Permukiman	Kabupaten Maros		1 Paket	
	Pengadaan TPS 3R	Kabupaten Maros		1 Paket	
2	Program Kawasan Permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas kawasan kumuh tertangani		dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Penyusunan rencana tapak (Site plan) perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	
	Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engiineering Design Peremajaan kumuh dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan di bwah 15 (lima belas) Ha	Kab. Maros		1 Paket	
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Kawasan Kumuh	Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Pada Kawasan Permukiman Kumuh	Kaburu, Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kaburu, Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Macanre Kec. Lilirilau Kab. Soppeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Jenepono		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Bone		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Lumbewe, Kec. Burau Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan Pattalassang, Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kabupaten Gowa		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	kasomberang lrg 5 RT 02 RW 03 Paccinongang, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	BTN PEPABRI Kel. Atakkae Kec. Tempe, Kab. Wajo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Maddukelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Pajalesang, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Boting, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Buntu Datu, Kec. Bara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Tobulung, Kec. Bara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Mungkajang, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Punaga, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Poros Sitra Samata Permai /sanrego- Mala'lang, romang polong, Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Lerang-Lerang, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Tello Baru, Kec. Panakkukang Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Mangadu, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Macanre Kec. Lilirilau Kab. Soppeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Lingkungan Mannaungi, Kel. Baju Bodoa Kec. Maros Baru Kab. Maros		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Soppeng		1 Paket	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Lumbewe, Kec. Burau Kab. Luwu Timur		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Lappa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	RT/RW 003/002 Kel. Buntu Datu, Kec. Bara, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Ruas Jalan Mangga & Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Pajalesang, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Boting, Kec. Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Buntu Datu, Kec. Bara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Tobulung, Kec. Bara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Mungkajang, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Dusun Pallangga, Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Samata, Kec. Somba Upu Kab. Gowa		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Tello Baru, Kec. Panakkukang Kota Makassar		1 Paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman	Kecamatan Wara Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman	Kecamatan Wara Timur Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman	Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Kabupaten Maros		1 Paket	

Tabel: II. 24
Usulan Program kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Prov. Sulsel (T.C. 32)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perumahan		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
1.1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	125 Unit	
1.1.1	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
	Perenc. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Desa tungka, Kab. Enrekang		1 Dokumen	
		Kec. Bittuang, Kec. Makale Selatan, Kec. Rano, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja		1 Dokumen	
1.1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	85 Unit	
	rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Lerompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Latimojong, Bastem, Bastem Utara, Lamasi Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Kab. Luwu		75 Unit	
		Kelurahan Bontoramba, Kec.Somba Opu, Kab. Gowa		10 Unit	
	Pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	Desa Mappedeceng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		Desa salulemo Kec Baebunta, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		desa mekar jaya kec mappedeceng, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman	Kel. Bone Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		Jl. Lesangi, Jl. Salawati Daud dan Jl. Syuhada Bagian Utara Kel. Bone Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		Desa Mappedeceng dan Desa Mekar Jaya Kec Mappedeceng, Desa Salulemo Kec Baebunta, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Mappedeceng Kec Mappedeceng, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		Desa Salulemo Kec Baebunta, Kab. Luwu Utara		1 Paket	
		Desa Mekar Jaya Kec Mappedeceng, Kab. Luwu Utara		1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih /Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
1.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan		
1.1.2	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
	Penyusunan DED PSU Kawasan Permukiman	Makale, Kab. Tana Toraja		1 Dokumen	
		Desa Pundi Lemo, Dusun Tiktok, Desa Tungka dan Kel.Lewaja, Kab. Enrekang		1 Dokumen	
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jalan Lingkar Samping BTN Sanur 2 Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto	Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Lokasi	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kecamatan Cendana, Enrekang, Anggeraja, Buntu Batu, Malua, Kab. Enrekang		1 Lokasi	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Botang Kec. Makale, Lembang Bulian Massa"bu Kec. Sangalla, Lembang banga Kec. Rembon, Lembang Rembo-rembo Kec. Bittuang, Lembang Sandana Kec. Bittuang, Lembang Bau Kec. Bittuang, Lembang Belau Kec. Masanda, Kelurahan Lemo Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja		14 Lokasi	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lemb. Marinding Kec. Mengkendek, Lemb. Pali Kec. Bittunang, Kel. Talion Kec. Rembon, Kel. Padangiring Kec. Rantetayo, Kel. Tapparan Utara Kec. Rantetayo, Lemb. Kolesawangan Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja		1 lokasi	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Ariang Kec. Makale, Kel. Lamunan Kec. Makale, Kel. Lapandan Kec. Makale, Kel. Botang Kec. Makale, Kab. Tana Toraja		1 lokasi	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl.Mustafa Dg Bunga VI / Jl.Beroangin, Lingkungan Beroanging, Kel.Romang polong, Kec Somba Opu, Kab. Gowa		1 lokasi	
	Pembangunan Drainase	Kel. Bone dan Kel. Kappuna Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara		1 lokasi	
	Pembangunan Drainase	Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan		1 Lokasi	
	Pembangunan Drainase	Kel.Galonta, Desa Karrang, Desa Bone Bone, Kab. Enrekang		1 Lokasi	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Drainase	Jl.Mustafa Dg Bunga VI / Jl.Beroangin, Lingkungan Beroanging, Kel.Romang polong, Kec Somba Opu, Kab. Gowa		1 Lokasi	
	Pembangunan PSU Air bersih/Arsinum	Semua Kecamatan, Kab. Bantaeng		1 Paket	
	Pembangunan PSU Air bersih/Arsinum	Pasilambena, Takabonerate, Bontosikuyu, Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar			
	Pembangunan PSU Air bersih/Arsinum	Kel. Labessi Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng		1 Lokasi	
	Pembangunan PSU Air bersih/Arsinum	Lemb. Patongloan Kec. Bittuang, Kel. Pattan Uluvalu Kec. Saluputti, Lemb. Miallo Kec. Mappak, Kel. Rantekalua Kec. Mengkendek, Kel. Mebali Kec. Mengkendek, Lemb. Balla Kec. Bittuang, Lemb. Ratte Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja		7 lokasi	
	Pembangunan PSU Air bersih/Arsinum	Lemb. sasakKec. Bittuang, Lemb. Rembo-Rembo Kec. Bittuang, Lemb. Sandana Kec. Bittuang, Lemb. Bau Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja		4 lokasi	
	Pembangunan RTH Kawasan Permukiman	Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba		1 Kawasan	
	Pengadaan TPS 3R	Desa Karrang, dan Desa Bone bone, Kab. Enrekang		1 Paket	
2	Program Kawasan Permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan d disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas kawasan kumuh tertangani		
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Penyusunan rencana tapak (Site plan) perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kab. Kepulauan Selayar		1 Dokumen	
	Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engiineering Design Peremajaan kumuh dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan di bwah 15 (lima belas) Ha	Kab. Maros		1 Dokumen	
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Kawasan Pesisir I (Kec Bissappu) Kawasan Pesisir 2 (Kec Pajukukang), Kab. Bantaeng		1 Kawasan	
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Desa Mabonta, Kec. Burau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Bawalipu Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Desa Wonorejo, Kec. Mangkutana, Desa Balantang, Kec. Malili, Desa Baruga, Kec. Malili, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur		7 Kawasan	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kel. Pajalesang, Kel. Lagaligo, Kel. Boting, Kel. Malatunrung, Kel. Buntu Datu, Kel. To'Bulung, Kel. Mungkajang,, Kota Palopo		140 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Uluere, Kab. Bantaeng		35 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kabupaten Toraja Utara, Kab. Toraja Utara		200 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu, Pasilambena, Pasimasunggu dan Takabonerate, Kab. Kepulauan Selayar		912 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kabupaten Bone, Kab. Bone		250 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tersebar di 11 Kecamatan, Kab. Jeneponto		50 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kec. Tempe, Kec. Sajoangning, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo		175 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kab. Enrekang		100 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	8 Kecamatan, yang termasuk dalam SK Kawasan Kumuh, Kab. Enrekang		100 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Burau Pantai Kec. Burau, Desa Watangpanua Kec. Angkona, Desa Wasuponda Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur		100 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kec. Burau, tomoni, nuha, Kab. Luwu Timur		50 unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan bontobontoa, kec.Somba Opu, Kab. Gowa		10 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Tamarunang, Kec.Somba Opu, Kab. Gowa		10 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Mangalli, Kec.Pallangga, Kab. Gowa		10 Unit	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Tompobalang, Kec.Somba Opu, Kab. Gowa		10 Unit	
	Pengembangan Jaringan Air Bersih Permukiman Kumuh	Kawasan Pesisir I (Kec Bissappu) Kawasan Pesisir 2 (Kec Pajukukang), Kab. Bantaeng		2 Lokasi	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. to'bulung, Kel. Boting, Kel. Malatunrung, Kel. Pajalesang dan Kel. Buntu Datu, Kota Palopo		5 Lokasi	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	6 Kecamatan, Kab. Soppeng		1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Tersebar diwilayah kawasan kumuh, Kab.Jeneponto		1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kec. Tempe, Kec. Majauleng, Kec. Pammana, Kab. Wajo		1 Paket	
	Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh	Kelurahan to'bulung, Kel. Boting, Kel. Malatunrung, Kel. Pajalesang dan Kel. Buntu Datu, Kota Palopo		1 Paket	
	Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh	desa cimpu utara, desa cimpu Kab. Luwu, Kab. Luwu		1 Paket	
	Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh	Seluruh Kecamatan, Kab. Soppeng		1 Paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman (TPS 3R)	Kelurahan Kaca Kec. Marioriawa dan Kelurahan Cabenge Kec. Lilirilau, Kab.Soppeng		1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. Berikut Arah Kebijakan Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visi Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Adapun Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.1
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024 Per Program
(Rp. juta)

PROGRAM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	TOTAL
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,706,385	38,938,073	35,403,320	38,175,437	33,893,935	176,117,151
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	8,949,998	10,070,279	10,877,230	11,424,530	12,131,389	53,453,430
TOTAL						889,050,471

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel

Dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan visi dan misi yang dijawantahkan melalui tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan yaitu :

3.2.1. Tujuan

Adapun Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.
2. Pencapaian SPM Bidang Perumahan.
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman.
4. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

3.2.2. Sasaran

Adapun Sasaran Jangka Menengah Daerah yang terdapat dalam renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
2. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi
3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
4. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
2. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman.
3. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penyehatan lingkungan permukiman.
4. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi
5. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsi.

Sasaran Strategis yang akan dicapai di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah (1) Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi (SPM), (2) Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Permukiman khususnya rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan pesisir dan kepulauan (Prioritas) dan (3) Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak khususnya Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Prioritas). Sasaran Strategis di Bidang Pertanahan diarahkan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah dan pemanfaatan tanah kewenangan provinsi.

Selain hal tersebut diatas Faktor Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan. Dinas Perkimtan telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan

Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG); (5) Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 disusun mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan mempertimbangkan isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel yang telah dianalisis menggunakan metode SWOT yang telah diuraikan pada BAB II sebelumnya serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka untuk Tahun 2023 direncanakan ada 8 (Delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan Total Pagu Anggaran **Rp.40.888.052.480,-** (Empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penatagunaan Tanah
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023.

Tabel III.2:
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				40.888.052.480	Pendapatan Asli Daerah			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.266.052.480	Pendapatan Asli Daerah			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		100 % 100 %	6.472.408.088	Pendapatan Asli Daerah		100 % 100 %	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi		5 Dokumen	1.046.481.900	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	1.144.584.613
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	594.866.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	237.051.163
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	91.752.500	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	107.470.150
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1 Dokumen	116.375.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	109.600.075
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi		1 Dokumen	126.287.400	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	103.730.575
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 Dokumen	117.201.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	586.732.650

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi		195 orang	234.079.800	Pendapatan Asli Daerah		195 orang	621.839.820
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		50 Orang	71.827.000	Pendapatan Asli Daerah		50 Orang	271.916.400
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		50 Orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		50 Orang	271.916.400
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		50 Orang	23.666.500	Pendapatan Asli Daerah		50 Orang	61.916.400
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih		45 Orang	8.669.000	Pendapatan Asli Daerah		45 Orang	4.992.120
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		1 Dokumen	27.278.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	4.000.500

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan		1 Dokumen	52.639.300	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	7.098.000
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun		40 Unit	5.191.846.388	Pendapatan Asli Daerah		40 Unit	3.155.796.538
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang ter rehabilitasi		40 Unit Rumah	5.052.778.388	Pendapatan Asli Daerah		40 Unit Rumah	2.974.722.988
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	139.068.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	181.073.550
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		36,37 %	5.136.586.600	Pendapatan Asli Daerah		36,37 %	11.301.690.363
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh		1 Dokumen	434.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	1.401.562.638

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		1 Laporan	240.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	842.722.650
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan	106.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	347.053.913
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Laporan	88.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	211.786.075
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh tertangani		120 Ha	4.702.586.600	Pendapatan Asli Daerah		120 Ha	9.900.127.725
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		9 Dokumen	282.000.000	Pendapatan Asli Daerah		9 Dokumen	1.203.826.075

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		120 Ha	4.420.586.600	Pendapatan Asli Daerah		120 Ha	8.696.301.650
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan		100 %	12.715.004.200	Pendapatan Asli Daerah		100 %	10.254.103.965
						Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman		93 %				93 %	
						Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		100 %				100 %	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan		21 kawasan	12.715.004.200	Pendapatan Asli Daerah		21 kawasan	10.254.103.965
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		1 Dokumen	1.116.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	870.073.613
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi		21 Lokasi	11.433.004.200	Pendapatan Asli Daerah		21 Lokasi	9.094.419.839

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						permukiman							
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman		1 Laporan	92.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	143.465.725
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman		1 Dokumen	74.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	146.144.788
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		100 %	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah		100 %	597.177.508
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU		15 Pengembang	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah		15 Pengembang	597.177.508

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah Kualifikasi Menengah		9 Laporan	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah		9 Laporan	597.177.508
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100 % 100 % 100 %	15.280.053.592	Pendapatan Asli Daerah		100 % 100 % 100 %	25.834.907.189
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	713.120.400	Pendapatan Asli Daerah		100%	2.616.858.649
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	428.073.400	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	1.993.268.063
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	64.289.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	163.251.913

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	35.638.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	100.912.875
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.146.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	19.260.150
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	7.029.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	15.480.150
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	73.850.000	Pendapatan Asli Daerah		1 laporan	141.317.648
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	99.095.000	Pendapatan Asli Daerah		1 laporan	183.367.850
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu		100%	12.249.915.560	Pendapatan Asli Daerah		100%	19.341.491.748

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		119 Orang/ Bulan	11.860.280.460	Pendapatan Asli Daerah		119 Orang/ Bulan	19.015.660.410
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	12.668.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	2.808.750
1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	50.794.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	83.554.825
1	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	22.334.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	3.480.750
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	13.169.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	105.631.050
1	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	238.668.900	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	42.698.788
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		3 Laporan	11.712.500	Pendapatan Asli Daerah		3 Laporan	5.068.350

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ran SKPD							
1	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	40.286.300	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	82.588.825
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		4 Laporan	108.400.800	Pendapatan Asli Daerah		4 Laporan	291.936.263
1	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	35.045.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	191.671.738
1	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	11.495.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	15.502.200
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	61.860.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	84.762.325
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 Laporan	368.870.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	588.888.401

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	81.910.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	208.015.500
1	04	01	1.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kependudukan		1 Dokumen	142.495.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	172.497.713
1	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	84.525.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	123.465.863
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	59.940.000	Pendapatan Asli Daerah		20 Orang	84.909.325
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		1 Laporan	267.991.500	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	945.435.488
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 Paket	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	9.348.938
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	107.910.500	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	771.871.275
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 Paket	25.028.500	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	53.944.275

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		1 Laporan	100.052.500	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	110.271.000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	52.762.500
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 Paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	52.762.500
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Laporan	475.083.532	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	433.439.826
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 Laporan	475.083.532	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	433.439.826
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Laporan	1.046.671.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	1.564.094.314
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 Unit	624.048.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Unit	156.796.500

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	142.800.000	Pendapatan Asli Daerah		6 Unit	211.869.000
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	279.823.800	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	1.195.428.814
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				622.000.000	Pendapatan Asli Daerah			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100 %	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah		100 %	182.009.150
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		7 lokasi	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah		7 lokasi	182.009.150
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		1 Dokumen	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	182.009.150

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi		100 %	147.000.000	Pendapatan Asli Daerah		100 %	259.839.350
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah		7 kasus	147.000.000	Pendapatan Asli Daerah		7 kasus	259.839.350
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Dokumen	49.000.000	Pendapatan Asli Daerah		Dokumen	133.405.675
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi		7 Berita Acara	98.000.000	Pendapatan Asli Daerah		7 Berita Acara	126.433.675
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota		100 %	335.000.000	Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.181.827.013

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		1 Dokumen	335.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	1.181.827.013
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		1 Laporan	267.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	138.226.225
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	68.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	1.043.600.788

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2023 akan fokus pada upaya pemulihan dampak pandemi *covid-19* terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia sesuai dengan tema yang diangkat pada RKPD Prov. Sulsel yaitu.

"Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter"

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan juga mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018-2023 serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka pada tahun 2023 direncanakan 8 (Delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan Total Pagu Anggaran **Rp.40.888.052.480,-** (Empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penatagunaan Tanah
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023.

Tabel. IV.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				40.888.052.480	Pendapatan Asli Daerah	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.266.052.480	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)	Sulsel	100 % 100 %	6.472.408.088	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi		5 Dokumen	1.046.481.900	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	594.866.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	91.752.500	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1 Dokumen	116.375.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi		1 Dokumen	126.287.400	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 Dokumen	117.201.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi		195 orang	234.079.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		50 Orang	71.827.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		50 Orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		50 Orang	23.666.500	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih		45 Orang	8.669.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		1 Dokumen	27.278.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan		1 Dokumen	52.639.300	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	Kab. Luwu Utara	40 Unit	5.191.846.388	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terehabilitasi	Kab. Luwu Utara	40 Unit Rumah	5.052.778.388	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Kab. Luwu Utara	1 Dokumen	139.068.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		36,37 %	5.136.586.600	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh		1 Dokumen	434.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		1 Laporan	240.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan	106.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Laporan	88.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh tertangani		120 Ha	4.702.586.600	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		9 Dokumen	282.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		120 Ha	4.420.586.600	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		100 % 93 % 100 %	12.715.004.200	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan		21 kawasan	12.715.004.200	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		1 Dokumen	1.116.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman		21 Lokasi	11.433.004.200	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman		1 Laporan	92.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU Permukiman		1 Dokumen	74.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		100 %	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU		15 Pengembang	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah Kualifikasi Menengah		9 Laporan	662.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100 % 100 % 100 %	15.280.053.592	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	713.120.400	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	428.073.400	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	64.289.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	35.638.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.146.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	7.029.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	73.850.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	99.095.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu		100%	12.249.915.560	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		119 Orang/ Bulan	11.860.280.460	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	12.668.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	50.794.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	22.334.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	13.169.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	238.668.900	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		3 Laporan	11.712.500	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	40.286.300	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		4 Laporan	108.400.800	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	35.045.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	11.495.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	61.860.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah		1 Laporan	368.870.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	81.910.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	142.495.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	84.525.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	59.940.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		1 Laporan	267.991.500	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 Paket	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	107.910.500	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 Paket	25.028.500	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		1 Laporan	100.052.500	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.07	05	Penga daan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 Paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Laporan	475.083.532	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 Laporan	475.083.532	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Laporan	1.046.671.800	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 Unit	624.048.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	142.800.000	Pendapatan Asli Daerah	
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi		1 Unit	279.823.800	Pendapatan Asli Daerah	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				622.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100 %	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		7 lokasi	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Penda taan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Penda taan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pemba ngunan dan Penetapan Lokasi Penga daan Tanah untuk Kepentingan Umum		1 Dokumen	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi		100 %	147.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah		7 kasus	147.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Dokumen	49.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi		7 Berita Acara	98.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota		100 %	335.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		1 Dokumen	335.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		1 Laporan	267.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	68.000.000	Pendapatan Asli Daerah	

BAB V

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diuraikan dalam Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan difokuskan pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Renja PD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan Perubahan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan daerah pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka pemulihan ekonomi dan pencapaian target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan;

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. Renja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan OPD, berisi tentang rancangan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Rencana pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renja Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
2. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
4. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD/Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

5.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan Program/Kegiatan diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJMD/Renstra untuk Tahun 2023 yaitu: “pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter” sehingga program kegiatan mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin

pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 ini disusun, guna menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan, dan semoga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Sulawesi Selatan.

Makassar, 25 Juli 2022
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel



Dr. M. Iqbal S. Suhaeb. SE, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001